

**DAMPAK PENGEMBANGAN SISTEM PAJAK RESTORAN SUSHI TEI SECARA  
ONLINE TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  
DI KOTA PALEMBANG PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Abdul Rozak Luthfi  
NPP. 31.0211

*Asdaf Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan*  
*Program Studi Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat*  
Email: [31.0211@praja.ipdn.ac.id](mailto:31.0211@praja.ipdn.ac.id)

Pembimbing Skripsi: Dr. Rosmery Elsy SH, M.Si.

**ABSTRACT**

**Problem Statement/Background (GAP):** *In an effort to increase Palembang City's Original Regional Income in the taxation sector, as the tax management agency in Palembang City, the Regional Tax Management Agency has installed and recommended the use of 128 non-system e-tax tools and 272 systemized e-tax tools. There are 200 e-tax tools that will be installed in the near future. The e-tax tool whose installation is maximized has a target of 1,000 e-tax tools to increase the value of PAD in the city of Palembang. The E-Tax program not only plays a role in monitoring and predicting local tax targets and realization each year, but can also increase the participation and active role of taxpayers or the public in managing their tax obligations.* **Purpose:** *The purpose of this research is to find out and analyze the Regional Government Strategy in Accelerating Rice Self-Sufficiency in Kuantan Singingi Regency, Riau Province, to find out and analyze the supporting and inhibiting factors of the Regional Government Strategy in Accelerating Rice Self-Sufficiency in Kuantan Singingi Regency, Riau Province, to find out and analyzing efforts to overcome the inhibiting factors of Regional Government Strategy in Accelerating Rice Self-Sufficiency in Kuantan Singingi Regency, Riau Province.* **Method:** *The theory used as an analytical tool in writing this thesis is using the SOAR Strategy theory from Stavros, J.M, and Cole which explains that the SOAR Strategy looks at 4 (four) elements, namely Strengths, Opportunities, Aspirations. ), Results (Results). The writing method used is qualitative writing with a descriptive method and an inductive approach. The data collection techniques used were interviews, observation and documentation.* **Result:** *The theory used as an analytical tool in writing this thesis is using the SOAR Strategy theory from Stavros, J.M, and Cole which explains that the SOAR Strategy looks at 4 (four) elements, namely Strengths, Opportunities, Aspirations. ), Results (Results). The writing method used is qualitative writing with a descriptive method and an inductive approach. The data collection techniques used were interviews, observation and documentation.* **Conclusion:** *The impact of implementing this online tax system is felt to be very good, this is in accordance with interviews with officials at the Regional Revenue Agency and this is also proven by the increase in Palembang City's Original Regional Income (PAD) from the year before the online tax system was implemented and after the online tax system was implemented. Increasing restaurant taxpayer compliance is considered to have a significant impact on increasing restaurant taxpayer compliance because with the implementation of this system, taxpayers are required to pay according to what is recorded on the tapping box tool.*

**Keywords:** *Online Tax System, Sushi Tei Restaurant, Inxrease in Local Own-Source Revenue (PAD), Palembang City.*

## ABSTRAK

**Permasalahan (GAP):** Dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang dalam sector perpajakan, maka sebagai instansi pengelola pajak di Kota Palembang, Badan Pengelola Pajak Daerah telah memasang dan menyarankan penggunaan 128 alat e-tax non system dan 272 alat e-tax yang telah tersistem. Terdapat 200 alat e-tax yang akan segera dipasang dalam waktu dekat. Alat e-tax yang dimaksimalkan pemasangannya memiliki target 1.000 alat e-tax untuk meningkatkan perolehan nilai PAD di kota Palembang. Program E-Tax tidak hanya berperan dalam pemantauan dan prediksi target serta realisasi pajak daerah setiap tahunnya, tetapi juga dapat meningkatkan partisipasi dan peran aktif wajib pajak atau masyarakat dalam mengelola kewajiban perpajakan mereka. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dampak pengembangan sistem pajak restoran Sushi Tei secara online terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. **Metode:** Adapun teori yang dipakai sebagai pisau analisis dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan teori Sistem Pajak Online (Mardiasmo, 2016:4) yang menjelaskan bahwa dalam teori ini terdiri dari 3 (tiga) dimensi Sistem *E-Registration*, Sistem *E-Filing* dan Sistem *E-Billing*. Metode penulisan yang digunakan adalah penulisan kualitatif dengan metode deskriptif dan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Penerapan sistem pajak online telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan PAD Kota Palembang. Namun, terdapat beberapa kendala seperti kurangnya pengetahuan wajib pajak tentang sistem pajak online yang berpengaruh pada kepatuhan mereka. Faktor pendukung meliputi dukungan pengawasan dari pemerintah, sedangkan faktor penghambat meliputi kurangnya kesadaran wajib pajak. Kesimpulannya, meskipun sistem pajak online telah memberikan manfaat, masih diperlukan perbaikan dan peningkatan kesadaran wajib pajak untuk memaksimalkan potensi PAD. **Kesimpulan:** Dampak penerapan sistem pajak online ini dirasa sangat baik hal ini sesuai dengan wawancara bersama perangkat di Badan Pendapatan Daerah dan hal ini juga dibuktikan dengan kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palembang dari tahun sebelum diadakannya sistem pajak online dan setelah diadakannya sistem pajak online. Meningkatkan kepatuhan wajib pajak restoran hal ini dinilai sangat berpengaruh terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak restoran karena dengan diadakannya sistem ini wajib pajak dituntut untuk membayar sesuai dengan yang terdata pada alat *tappingbox* tersebut. **Kata kunci:** Sistem Pajak Online, Restoran Sushi Tei, Peningkatan Pendapatan Daerah (PAD), Kota Palembang,

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, wajib pajak restoran memiliki hak untuk mengenakan pajak atas layanan yang diberikan kepada pelanggan dan memiliki kewajiban untuk melaporkan dan membayar pajak tersebut kepada pemerintah daerah. Kemandirian dalam bidang Keuangan di daerah, dapat diusahakan dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mengurangi ketergantungan dari bantuan pusat. Salah satu cara untuk mengurangi ketergantungan dari bantuan pusat, yaitu dengan peningkatan penerimaan PAD melalui pajak ataupun retribusi daerah.

Dengan adanya pendapatan asli daerah maka akan meminimalisir ketergantungan daerah

terhadap bantuan pusat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah dalam perpajakan dan retribusi sejalan dengan semakin besarnya tanggungjawab daerah dalam penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat;
2. Meningkatkan akuntabilitas daerah dalam penyediaan layanan dan serta memperkuat otonomi daerah; dan
3. Memberikan kepastian bagi dunia usaha mengenal jenis-jenis pemungutan daerah dan memperkuat dasar hukum pemungutan dan retribusi daerah.

Dalam hal ini, Badan Pengelola Pajak Daerah Kota Palembang memegang peran penting dalam administrasi pendapatan pajak daerah. Badan ini bertugas mengelola berbagai sumber pendapatan asli daerah, terutama pendapatan dari berbagai jenis pajak daerah seperti Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Bahan Galian, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak PBB Pedesaan dan Perkotaan, dan Pajak BPHTB. Sebagai bagian dari kota yang memiliki otonomi, Kota Pematangsiantar diharapkan untuk melaksanakan beragam program pembangunan, baik yang bersifat jangka pendek maupun jangka panjang. Perkembangan pesat dalam teknologi informasi telah menghasilkan pertumbuhan yang signifikan dalam aplikasi sistem informasi. Aplikasi sistem informasi dan perkembangan teknologi informasi memiliki dampak yang besar pada kehidupan sosial dan dunia bisnis. Salah satu cara di mana teknologi informasi dan komunikasi telah diimplementasikan dalam konteks ekonomi dan bisnis adalah melalui penggunaan sistem *Tapping box* di restoran. *Tapping box* adalah perangkat atau sistem pencatat transaksi yang merekam semua informasi transaksi dari mesin kasir ke printer *point of sales*, dan mengirimkannya melalui jaringan *Global System for Mobile (GSM)* ke server Badan Pendapatan Daerah. Dalam sistem ini, proses transaksi yang terjadi akan direkam dalam sistem untuk mengurangi potensi kecurangan dalam pelaporan pendapatan. Dengan cara ini, sistem *Tapping box* berpotensi membantu mengoptimalkan proses perhitungan dan pemungutan pajak di sektor restoran. Dalam penerapan sistem pajak ini, pentingnya partisipasi, integritas, kesadaran, dan disiplin wajib pajak dalam melaporkan kewajiban pajak mereka sesuai dengan regulasi perpajakan yang berlaku sangatlah krusial. Dalam upaya untuk mengimplementasikan *Self Assessment System* ini, Kota Palembang telah menerbitkan Peraturan Walikota Palembang Nomor 84 Tahun 2018 yang mengatur tata cara pembayaran dan pelaporan transaksi usaha pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak parkir secara daring. Pemaknaan pembayaran secara online inilah yang disebut dengan E-Tax atau *electronic tax* (Pajak elektronik). Regulasi tersebut merupakan bentuk tindak lanjut pemerintah daerah dalam rangka mempermudah memberikan pelayanan kepada wajib pajak daerah dalam bentuk pelayanan yang berbasis elektronik. Hingga saat ini, sejak tahun 2018, Pemerintah Kota Palembang telah memasang total 600 unit perangkat E-Tax di berbagai unit usaha yang menjadi wajib pajak. Pada tahun 2020, melalui Badan Pengelolaan Pajak Daerah (BPPD), Pemerintah Kota Palembang telah memasang 100 unit E-Tax dan *Tapping box*.

## 1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Realisasi penerimaan pajak perlu dibandingkan dengan target pajak. Untuk itu perlu diketahui tingkat efektivitas penerimaan pajak daerah di kota Palembang. Menurut Suherman (2011), penerimaan atau pendapatan pajak dapat didefinisikan sebagai penghasilan yang diperoleh oleh pemerintah dari masyarakat dalam bentuk pajak. Definisi tersebut tidak hanya mencakup pengertian bahwa dana yang diterima oleh kas negara digunakan untuk pengeluaran pemerintah, tetapi juga menegaskan tujuan utama negara untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan menciptakan kemakmuran berdasarkan prinsip keadilan sosial, sesuai dengan visi

para pendiri negara. Data yang telah dijelaskan sebelumnya dengan jelas menunjukkan dampak positif dari penggunaan alat E-Tax dalam sistem perpajakan di Kota Palembang. Program ini, yang berfokus pada tata kelola pajak daerah melalui penggunaan teknologi E-Tax, memiliki potensi untuk memberikan hasil yang baik jika diimplementasikan dengan mengedepankan konsep kinerja pelayanan publik yang efektif serta melibatkan partisipasi masyarakat. Program E-Tax tidak hanya berperan dalam pemantauan dan prediksi target serta realisasi pajak daerah setiap tahunnya, tetapi juga dapat meningkatkan partisipasi dan peran aktif wajib pajak atau masyarakat dalam mengelola kewajiban perpajakan mereka. Dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang dalam sector perpajakan, maka sebagai instansi pengelola pajak di Kota Palembang, Badan Pengelola Pajak Daerah telah memasang dan menyarankan penggunaan 128 alat e-tax non system dan 272 alat e-tax yang telah tersistem. Terdapat 200 alat e-tax yang akan segera dipasang dalam waktu dekat. Alat e-tax yang dimaksimalkan pemasangannya memiliki target 1.000 alat e-tax untuk meningkatkan perolehan nilai PAD di kota Palembang. Dengan adanya program E-Tax, wajib pajak atau masyarakat dapat secara mandiri menilai, menghitung, melaporkan, dan membayarkan pajak mereka. Ini menciptakan kemandirian dalam proses perpajakan, di mana mereka memiliki tanggung jawab yang lebih besar terhadap kewajiban pajak mereka sendiri. Dalam hal ini, kinerja pelayanan yang baik dan partisipasi yang aktif dalam implementasi E-Tax di Kota Palembang menjadi faktor penting yang akan diperhatikan baik dari sudut pandang teoritis maupun praktis.

### **1.3 Penelitian Terdahulu**

Wotulo, F. L., Gamaliel, H., & Maradesa, D. (2021). Evaluasi Pajak Restoran Pada Masa Pandemi COVID-19 Di Kota Manado. Menjelaskan bahwa mekanisme pengumpulan dan pembayaran pajak restoran selama pandemi COVID-19 masih sama seperti pada waktu sebelum pandemi COVID-19. Target penerimaan pajak restoran selama pandemi COVID-19 berubah dengan penurunan 57% dari target induk. Adapun realisasi penerimaan pajak restoran selama pandemi.

Muhammad, N. (2020). *PENGARUH PAJAK RESTORAN DAN PAJAK HOTEL TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI TINJAU DARI PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM STUDI PADA BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH (BPPRD) KOTA METRO (2012-2019)*. Menjelaskan bahwa variabel independen Pajak Restoran (X1) secara parsial tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y), sementara Pajak Hotel (X2) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y). Secara simultan, uji F menunjukkan bahwa Pajak Restoran dan Pajak Hotel secara bersama-sama berpengaruh dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Metro. Dari perspektif ekonomi Islam, penarikan pajak di Kota Metro belum selaras dengan prinsip keadilan Islam yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pangemanan dan Kumayas (2021:15). Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun beberapa program telah dilaksanakan pada tahun 2020, namun program pemberdayaan UKM di Kota Manado masih belum tertata dengan baik, dan secara keseluruhan komunikasi di lingkungan dinas koperasi dan UKM di Kota Manado telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada. keputusan yang dibuat, arahan, atau perintah dari pimpinan. Meskipun terbatasnya pendanaan untuk pelaksanaan program, pelatihan tetap diberikan untuk memberdayakan UKM.

Yuli Rahmini Suci. (2017). *PERKEMBANGAN UMKM (USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH) DI INDONESIA*. Penelitian ini berkaitan dengan perkembangan pertumbuhan UKM di Indonesia. Beberapa literatur yang dirujuk adalah pemecahan masalah yang terjadi dan penggunaan data sekunder yang diperoleh dari instansi terkait seperti: CPM, BI dan Kementerian Koperasi dan UKM.

Purwanti, E. (2013). PENGARUH KARAKTERISTIK WIRAUSAHA, MODAL USAHA, STRATEGI PEMASARAN TERHADAP PERKEMBANGAN UMKM DI DESA DAYAAN DAN KALILONDO SALATIGA Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik wirausaha, modal usaha secara individu dan secara bersama berpengaruh signifikan terhadap perkembangan usaha, sedangkan strategi pemasaran secara individu tidak berpengaruh signifikan terhadap perkembangan usaha, namun demikian secara bersama berpengaruh signifikan. Hal ini dapat dijelaskan dalam menjalankan usahanya tidak menggunakan strategi pemasaran karena tidak dijual secara langsung ke konsumen namun dijual kepada para pedagang tanpa ada kemasan, label atau merk, penetapan harga hanya mengikuti pesaing saing sehingga tidak menggunakan strategi penentuan harga. Saran dari penelitian ini dapat dikembangkan dengan menambah variabel dalam penelitian dan sampel yang diambil dapat diperluas wilayahnya.

Sarfiah, S., Atmaja, H., & Verawati, D. (2019). UMKM Sebagai Pilar Membangun Ekonomi Bangsa Perkembangan di era globalisasi sangat bergantung pada sektor ekonomi sebagai ukuran keberhasilan yang dilakukan oleh pemerintah. Peran masyarakat dalam pembangunan nasional, khususnya dalam pembangunan ekonomi, adalah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Posisi UMKM dalam perekonomian nasional memiliki peran penting dan strategis. Kondisi ini sangat dimungkinkan karena keberadaan UMKM cukup dominan dalam perekonomian Indonesia. UMKM setelah krisis ekonomi terus meningkat dari tahun ke tahun. Ini juga membuktikan bahwa UMKM mampu bertahan di tengah krisis ekonomi. UMKM juga terbukti menyerap tenaga kerja yang lebih besar dalam perekonomian nasional.

Anggraeni, W. C., Ningtyas, W. P., & Nurdiyah, N. (2021). Kebijakan pemerintah dalam pemberdayaan UMKM di masa pandemi Covid-19 di Indonesia. Hasil tinjauan pustaka ini memperlihatkan bahwa pemerintah telah mengeluarkan kebijakan dalam rangka memperdayakan UMKM dalam situasi pandemi Covid-19. Terdapat beberapa skema perlindungan UMKM yang dilakukan pemerintah yaitu: (a) pemberian bantuan sosial kepada pelaku UMKM miskin dan rentan (b) intensif pajak bagi UMKM (c) relaksasi dan restrukturisasi kredit bagi UMKM (d) Perluasan Pembiayaan Model Kerja UMKM (e) Penyediaan Penyangga Produk. Untuk mendukung kebijakan pemerintah, beberapa strategi jangka pendek dan strategi jangka panjang perlu di pertimbangkan pemerintah. Strategi jangka pendek berkaitan dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat, member peluang dan dorongan layanan digital sebagai pendukung UMKM, sosialisasi asosiasi pelaku usaha, penyederhanaan proses administrasi, serta upaya mendorong perubahan strategi bisnis.

Fuadi, D. S., Akhyadi, A. S., & Saripah, I. (2021). Systematic Review: Strategi Pemberdayaan Pelaku UMKM Menuju Ekonomi Digital Melalui Aksi Sosial. *Dikus: Jurnal* Dari hasil analisis peran komunitas sosial memberikan kontribusi serta solusi terhadap permasalahan yang dihadapi untuk menekan kesenjangan arus digitalisasi antara desa dan kota. Manfaat dari penelitian ini bisa dijadikan bahan referensi dalam merancang kurikulum pengembangan dan pemberdayaan pelaku UMKM dalam menuju digitalisasi.

Putra, A. H. (2016). Peran UMKM dalam pembangunan dan kesejahteraan masyarakat kabupaten Blora. Hasil penelitian yang dapat diambil dari pembahasan diatas adalah perlu penerapan ekonomi kerakyatan guna mewujudkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Bentuk nyata dari ekonomi kerakyatan yaitu berupa dukungan kepada usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), sehingga hasil produksi dari UMKM tidak hanya dipasarkan di pasar lokal tetapi juga diluar daerah dan semakin berkembang. Apalagi jika didukung dengan pemanfaatan teknologi informasi, pemasaran produk tidak lagi dibatasi tempat dan waktu. Serta tidak hanya dari Pemerintah saja melainkan partisipasi dari masyarakat dan dukungan dari pemerintah dapat membuka jalan baru bagi masyarakat yang ingin berwirausaha dari mulai usaha kecil sampai menengah.

Naimah, R. J., Wardhana, M. W., Haryanto, R., & Pebrianto, A. (2020). Penerapan digital marketing sebagai strategi pemasaran UMKM. Penelitian yang dihasilkan berupa akun bisnis dan Google Google, artikel ilmiah yang dipublikasikan di jurnal nasional, dan laporan kegiatan. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah dengan memberikan pelatihan berupa ceramah dan memberikan tutorial/praktik langsung membuat akun di media digital untuk UMKM.

#### 1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu. Penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan keadaan yang baharu serta informan yang berbeda dan luas. GAP penelitian juga hanya ada dan merupakan masalah khusus yang terjadi di lokus penelitian yaitu **DAMPAK PENGEMBANGAN SISTEM PAJAK RESTORAN SUSHI TEI SECARA ONLINE TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KOTA PALEMBANG PROVINSI SUMATERA SELATAN.**

#### 1.5 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis dampak penerimaan pajak restoran setelah menggunakan sistem pajak online;
2. Untuk mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi penerapan pajak online terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD); dan
3. Untuk mengetahui upaya mengatasi faktor penghambat dalam penerapan sistem pajak online terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

### III. METODE

Aturan praktis bagi peneliti adalah melakukan pekerjaan mereka dengan keunggulan dan akurasi. Arikunto (2019:136) menyatakan bahwa strategi adalah teknik utama yang diteripakn peneliti dalam mencapai tujuan serta mengidentifikasi solusi terhadap permasalahan yang diangkat. Dalam pembagiannya pendekatan penelitian dibagi menjadi 3 macam yaitu pendekatan kualitatif, kuantitatif, serta *mix method* atau gabungan dari metode penelitian kuantitatif dan kualitatif. penulis memakai penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif dapat menafsirkan secara langsung keadaan yang ada dilapangan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dalam suatu penelitian. Penelitian kualitatif menurut Moleong (2005:6) dihasilkan dengan melihat fenomena-fenomena yang berhubungan dengan pengalaman, partisipan penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, dalam suatu setting alam tertentu secara menyeluruh dan melalui deskripsi verbal dan tertulis. dan dengan menggunakan berbagai teknik. Menurut (Sugiyono, 2019) yaitu "metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan kegunaan dan tujuan tertentu". Setiap penelitian mempunyai tujuan dan kegunaan tertentu. Secara umum tujuan penelitian ada tiga macam yaitu yang bersifat penemuan, pembuktian dan pengembangan. Memulai penelitian manusia dapat menggunakan hasilnya. Secara umum data: yang diperoleh dari peneltian dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah. Metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian yang berdasarkan fakta keadaan alam yang bersifat natural dalam kehidupan sosial seseorang Dalam menggunakan penelitian kualitatif dibutuhkan data atau informasi seperti teks hasil wawancara, catatan ketika berada dilapangan, dokumen-dokumen, dan bahan-bahan lain (foto, data dari sumber lain atau internet, dan lain-lain). Simangunsong (2017:192) juga menjelaskan bahwa penelitian kualitatif

meyakini bahwa fokus penelitian kualitatif adalah mencari makna. Oleh karena itu, harus diakui bahwa makna yang ditetapkan dalam penelitian kualitatif berbeda dengan ungkapan pertanyaan yang disusun menjadi “topik penelitian yang subjektif dan multipel”. Instrumen penelitian merupakan sebuah alat atau sarana yang digunakan peneliti untuk membantu dalam proses pengumpulan data agar proses tersebut bisa dipermudah.

#### **IV. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Tapping Box adalah sebuah perangkat yang dipasang di antara cash register atau point of sales dan printer wajib pajak di sektor-sektor seperti hotel, restoran, parkir, dan hiburan. Fungsinya adalah untuk merekam dan menangkap data dari struk pembelian yang dicetak oleh objek pajak, yang nantinya data tersebut akan dikirimkan ke server Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah. Pemasangan tapping box bertujuan untuk meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak dan juga untuk meningkatkan penerimaan pajak bagi pemerintah daerah. Berbagai daerah di Indonesia termasuk Kota Palembang telah menerapkan penggunaan *tapping box* pada sektor hotel, restoran dan tempat hiburan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada badan pendapatan daerah sebagai instansi yang memantau transaksi pada berbagai sumber pendapatan daerah tersebut, diketahui bahwa pemasangan tapping box pada sektor hotel, restoran dan tempat hiburan turut memberikan dampak pada kepatuhan wajib pajak, penerimaan pajak daerah dan pada pendapatan asli daerah. Pemasangan *tapping box* dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Kota Palembang sehingga hal tersebut mempengaruhi penerimaan asli daerah kota Palembang yang turut mengalami peningkatan. Adapun dimensi sistem pajak online yaitu meliputi :

##### **3.1. Sistem E-Registration**

Penerapan *e-system* perpajakan diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi wajib pajak maupun bagi pemerintah. Salah satu *e-system* perpajakan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak adalah *e-registration*. Dalam melaksanakan kewajiban dibidang perpajakan, wajib pajak harus melaksanakan rangkaian pemenuhan kewajiban perpajakan, yang dimulai dari mendaftarkan diri menjadi wajib pajak untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang bisa dilakukan dengan memanfaatkan *e-registration*. *E-registration* adalah sistem *online* yang digunakan untuk pendaftaran pajak bagi wajib pajak yang baru memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

##### **3.2. Sistem E-Filling**

Pembayaran pajak merupakan manifestasi dari kewajiban yang bersifat negara dan partisipasi aktif dari Wajib Pajak dalam memenuhi tanggung jawab perpajakan untuk mendukung keuangan negara dan pembangunan nasional. Secara umum, sebelum melakukan pembayaran pajak, Wajib Pajak diharuskan untuk menginformasikan jumlah pajak yang harus dibayarkan kepada otoritas pajak melalui Surat Setoran Pajak (SSP). Setelah pembayaran pajak dilakukan melalui SSP di bank atau kantor pos, Wajib Pajak kemudian melaporkan jumlah pajak yang telah dibayar atau dipotong melalui Surat Pemberitahuan (SPT). SPT ini berfungsi sebagai dokumen resmi yang berisi informasi perpajakan yang akurat mengenai jumlah pajak yang telah disetor oleh Wajib Pajak kepada pemerintah.

##### **3.3. Sistem E-Billing**

Sistem e-billing ini menerbitkan kode billing untuk pembayaran atau penyetoran penerimaan negara secara elektronik, tanpa perlu membuat surat setoran seperti Surat Setoran Pajak (SSP), Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP), dan Surat Setoran Pengembalian Pajak (SSPP) secara manual. Sistem e-billing memberikan keleluasaan wajib pajak dalam proses

perpajakan mulai dari mendaftar hingga membayar pajak. Sistem online pajak dibuat secara sederhana melalui suatu sistem sehingga para wajib pajak bisa membayar pajak hanya dengan melalui Hp/Smartphone yang memiliki koneksi internet. Wajib pajak dapat melakukan proses perpajakan dimana saja dan kapan saja sehingga mampu mengurangi kemungkinan keterlambatan dalam pelaporan maupun dalam pembayaran pajak karena tidak membutuhkan waktu yang lama. Untuk itu, hal ini menjadi pertimbangan bagi wajib pajak dalam menggunakan sistem *e-billing* tersebut.

### 3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

kekurangnya pengetahuan para wajib pajak terhadap sistem pajak online hal ini menyebabkan kurangnya kesadaran wajib pajak dalam hal penerapan alat tappingbox yang menyebabkan masyarakat tidak membayar pajak dengan teratur. Hal tersebut sama dengan temuan dari penelitian Muhammad, N. (2020) yang dimana sama-sama mengalami temuan yang sama yaitu terkait kurangnya pengetahuan masyarakat terkait wajib pajak.

## IV. KESIMPULAN

Dampak penerapan sistem pajak online ini dirasa sangat baik hal ini sesuai dengan wawancara bersama perangkat di Badan Pendapatan Daerah dan hal ini juga dibuktikan dengan kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palembang dari tahun sebelum diadakannya sistem pajak online dan setelah diadakannya sistem pajak online

**Keterbatasan Penelitian:** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian sehingga tidak maksimal dalam menemukan hasil.

**Arah Masa Depan Penelitian (future work):** Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan wajib pajak di Kota Palembang.

## V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantudan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

## VI. Daftar Pustaka

### Buku dan Jurnal

- Anggraeni, W. C., Ningtiyas, W. P., & Nurdiyah, N. (2021). Kebijakan pemerintah dalam pemberdayaan UMKM di masa pandemi Covid-19 di Indonesia. *Journal of Government and Politics (JGOP)*, 3(1), 47-65. [Kebijakan Pemerintah Dalam Pemberdayaan UMKM Di Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia | Anggraeni | Journal of Government and Politics \(JGOP\) \(ummat.ac.id\)](#)
- Arikunto S. (2019). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Fuadi, D. S., Akhyadi, A. S., & Saripah, I. (2021). Systematic Review: Strategi Pemberdayaan Pelaku UMKM Menuju Ekonomi Digital Melalui Aksi Sosial. *Diklus: Jurnal Pendidikan Luar Sekolah*, 5(1), 1-13. [Systematic Review: Strategi Pemberdayaan Pelaku UMKM Menuju Ekonomi Digital Melalui Aksi Sosial | Fuadi | Diklus: Jurnal Pendidikan Luar Sekolah \(uny.ac.id\)](#)
- Moleong, L. J. (2009). *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Yogyakarta: PT. Remaja Rosdakarya.

- Muhammad, N. (2020). *PENGARUH PAJAK RESTORAN DAN PAJAK HOTEL TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI TINJAU DARI PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM STUDI PADA BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH (BPPRD) KOTA METRO (2012-2019)* (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung). [SKRIPSI 2.pdf \(radenintan.ac.id\)](#)
- Naimah, R. J., Wardhana, M. W., Haryanto, R., & Pebrianto, A. (2020). Penerapan digital marketing sebagai strategi pemasaran UMKM. *Jurnal IMPACT: Implementation and Action*, 2(2), 119-130. [Penerapan Digital marketing Sebagai Strategi Pemasaran UMKM | Jurnal IMPACT: Implementation and Action \(poliban.ac.id\)](#)
- Pangemanan, S. E., & Kumayas, N. (2021). Efektifitas Program Pemberdayaan Masyarakat Bagi Usaha Kecil Menengah (UKM) Di Kota Manado. *GOVERNANCE*, 1(2). [Efektifitas Program Pemberdayaan Masyarakat Bagi Usaha Kecil Menengah \(UKM\) Di Kota Manado | GOVERNANCE \(unsrat.ac.id\)](#)
- Purwanti, E. (2013). Pengaruh karakteristik wirausaha, modal usaha, strategi pemasaran terhadap perkembangan UMKM di Desa Dayaan dan Kalilondo Salatiga. *Among Makarti*, 5(1). [PENGARUH KARAKTERISTIK WIRAUSAHA, MODAL USAHA, STRATEGI PEMASARAN TERHADAP PERKEMBANGAN UMKM DI DESA DAYAAN DAN KALILONDO SALATIGA | Purwanti | Among Makarti \(stieama.ac.id\)](#)
- Putra, A. H. (2016). Peran UMKM dalam pembangunan dan kesejahteraan masyarakat kabupaten Blora. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 5(2), 40-52. [article.php \(kemdikbud.go.id\)](#)
- Sarfiah, S., Atmaja, H., & Verawati, D. (2019). UMKM sebagai pilar membangun ekonomi bangsa. *Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan)*, 4(2), 1-189. [Garuda - Garba Rujukan Digital \(kemdikbud.go.id\)](#)
- Simangunsong, F. (2016). *Metodologi Penelitian Pemerintahan*. cet. 1. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono, 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. 23rd ed. Bandung: Alfabeta.
- Wotulo, F. L., Gamaliel, H., & Maradesa, D. (2021). Evaluasi Pajak Restoran Pada Masa Pandemi COVID-19 Di Kota Manado. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum)*, 5(1), 207-215. [Evaluasi Pajak Restoran Pada Masa Pandemi COVID-19 Di Kota Manado | Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum \(Ekonomi,Sosial,Budaya, dan Hukum\) \(unsrat.ac.id\)](#)
- Yuli Rahmini Suci. (2017). PERKEMBANGAN UMKM (USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH) DI INDONESIA. *Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos*, 6(1), 51-58. [PERKEMBANGAN UMKM \(USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH\) DI INDONESIA | Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos \(upp.ac.id\)](#)

### **Peraturan**

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah  
Peraturan Walikota Palembang Nomor 84 Tahun 2018 yang mengatur tata cara pembayaran dan pelaporan transaksi usaha pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak parkir secara daring.